

KORELASI OPINI AUDITOR DENGAN KINERJA PEMERINTAH

(Skripsi)

Oleh

MARIATINI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KORELASI OPINI AUDITOR DENGAN KINERJA PEMERINTAH

Oleh

MARIATINI

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai korelasi opini auditor dengan kinerja pemerintah daerah se-provinsi Sumatera Bagian Selatan tahun 2012 - 2016. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Opini Auditor yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi *product moment* dan juga uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhubungan sedang dengan kinerja pembangunan daerah se-Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Semakin baik opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemerintah daerah maka akan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah tersebut.

Kata kunci: opini auditor, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kinerja pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

CORRELATION OF AUDITOR'S OPINION WITH GOVERNMENT PERFORMANCE

By

MARIATINI

This study aims to provide empirical evidence regarding the correlation of auditor's opinion with the performance of local governments throughout the province of South Sumatra in 2012 - 2016. Sample selection using purposive sampling method. Auditor opinion obtained through Local Government Financial Report (LKPD) which has been audited by the Supreme Audit Board (BPK-RI). Hypothesis testing using product moment correlation test and also test of coefficient of determination.

The results of this study proves that the opinion of BPK auditors is in moderation with the performance of regional development in the province of Southern Sumatra. The better the BPK's opinion on the local government will be able to improve the development of the region's performance.

Keywords: Local Government Financial Report (LKPD), government performance, economic growth.

KORELASI OPINI AUDITOR DENGAN KINERJA PEMERINTAH

Oleh

MARIATINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KORELASI OPINI AUDITOR DENGAN KINERJA PEMERINTAH**

Nama Mahasiswa : Mariatini

Nomor Pokok Mahasiswa : 0641031058

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19700801 199512 2001

Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt.
NIP. 19820220200822003

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19620612 199010 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

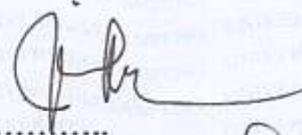
Ketua

: **Dr. Agrianti Komalasari, S.E.,M.Si,Akt**



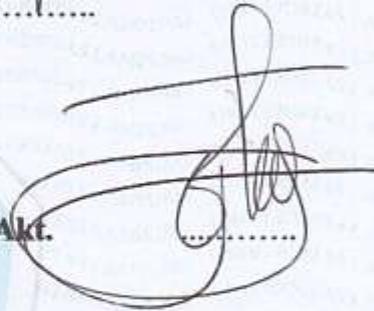
Sekretaris

: **Ninuk Dewi K., S.E.,M.Sc.,Akt.**



Penguji Utama

: **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.,Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul “Korelasi Opini Auditor dengan Kinerja Pemerintah adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018

Penulis,



Mariatini

NPM.0641031058



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal

10 Maret 1971 sebagai anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Alm Bapak H. Abdullah Kawi dan Alm Hj. Zalimah. Penulis menempuh Pendidikan di Taman Kanak- Kanak di TK. Latihan Negeri Tanjung Karang lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 01 Tanjung Gading Tanjung Karang Timur dan lulus pada tahun 1984.

Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Tanjung Karang hingga lulus pada tahun 1987, Lalu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Tanjung Karang hingga lulus pada tahun 1990. Penulis kemudian pada tahun 1991 melanjutkan pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan lulus pada tahun 1996. Pada Tahun 1996 juga

Penulis menempuh karir di Badan Pengelola Apartemen Casablanca sampai dengan Tahun 2005. Pada tahun 1999 penulis juga selain bekerja melanjutkan pendidikan S1 di FE – UI di Depok / Jakarta melalui program extension. Tetapi sebelum selesai menempuh pendidikan di FE- UI Depok penulis mengikuti tes ujian masuk pegawai negeri sipil di Lampung dan berhasil lulus dan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Bandar Lampung. Karena jarak Jakarta- Lampung yang jauh dan sebagai calon pegawai negeri sipil akhirnya pendidikan di FE- UI Jakarta tidak berhasil penulis selesaikan. Kemudian pada tahun 2006 Penulis mendaftar di FE- Unila dan berhasil lulus test masuk dan resmi terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program Non Reguler Universitas Lampung pada tahun 2006 dan berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 17 Januari 2018. Penulis juga tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandar Lampung di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (At-Taubah [9]: 105)

*“Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga.”
(HR. Muslim).*

*"Jika seorang manusia mati maka terputuslah darinya amalnya kecuali tiga hal, dari sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shalih yang mendoakannya."
(HR. Muslim no. 1631)*

*“ Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maka ia bertanya: “Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan apakah amal yang paling dicintai Allah azza wa jalla?” Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain...” (HR. Thabrani dalam Mu’jam Al-Kabir li Ath-Thabrani juz 11 hlm.84). Wallahu a’lam**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Alm umakku Zalmah

Alm. Ebak Abdullah Kawi

Alm. Kakakku Ferdinand

Suamiku Achamd Rochilan

Ayuk Sri

Kak iyan

Kak Maman

Adek Meli

Adek Agus

Adek Izoel

Seluruh keluarga besar

Semua sahabat, teman dan orang-orang terdekat.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Korelasi Opini Auditor dengan Kinerja Pemerintah**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Tri Joko Prastyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt. selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh program pendidikan S1.
8. Tina, Veri, Diana, Sobari, Leni, Ain, Andri, Nanang, Sri, Amel, Nasir, Wiwit, Lutfi, Budi, Nuraini, Yana, Yogi, Edi, selaku karyawan dan karyawan jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku tersayang Alm. Bapak H. Abdullah Kawi dan Alm. Ibu Hj Zalimah Kornu terima kasih atas kasih sayang, motivasi, doa, nasihat dengan setia membimbing penulis..
10. Suamiku Achmad Rochilan Tercinta terima kasih atas segala keceriaan dan kebahagiaan yang selalu terpancar serta selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Kangmas adalah sumber sumber inspirasiku, penyemangatku, yang selalu membuatku yakin bahwa aku akan selalu dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu .
11. Alm Bapak Solichin dan Ibu Hafsah , yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas Lampung ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan kehangatan.

12. Alm Kak Dinan, Ayu Sri, Kak Iyan, Kak Maman, Adek Meli, Adek Agus dan Adek Izul Keluarga Tercinta terima kasih atas kasih sayang, perhatian, do'a, dukungan, semangatnya selalu menjadi saudara dan sahabat yang terbaik, yang selalu ada di kala suka maupun susah, serta selalu menyenangkan untuk diajak bertukar pikiran serta pengetahuan.
13. Ibu Hj. Herliwaty, S.E., M.M, selaku Kabag Kesra Sekda Kota Bandar Lampung, Pak Hikzam, Bu Siti, Bu Fariana dan teman- teman Bagian Kesra terima kasih atas pengertian, perhatian, doa, dukungan dan semangatnya.
14. Mb Esti, Bang Udin, Ayuk Iyul, Mb Iis, Mas Susilo, Mas Zikin, Mb Wati, Mb Fiqoh, Adek Citra dan Adek Ita, Haqi terima kasih atas kasih sayang, doa, dan motivasinya.
15. Semua Keponakanku Kakak Erwin, Mulya Rizky, Daeng Aris, Aan, Dalom Faisal, Ridho, Pita, Maulana, Radit, Adek Zaki terima kasih atas do'a, candaan dan semangatnya.
16. Pusvita, Adi, Aan, Mila, Bik Dadeh terima kasih atas doa dan semangatnya.
17. Nita, Rini, Rizka, Sri, Vivin, Arief, Rizky, Didiek, Diky, Hanindro selaku teman seperjuangan dalam suka dan duka selama menyelesaikan skripsi.
18. Teman-teman Akuntansi : Dian, Ratih, Eli, Gipson, Adit, Adi, Dwi, Rian, Suherman, Dicky, Eriza, Heri, Rika, Pegy, Susita, Depita, Fadli, Arif., Kevin
19. Zulvi, Alm Cici, Liez, Aam, Maya, Dade, Eka, Susi Teman- teman RMNI STIE Indonesia Jakarta atas doa dan motovasinya
20. Nia Kurniasih, Linda Apriani , Dessy, Alm Lina, Ust. Emil, dan teman teman Smanda Takara dan Extention UI Jakarta terima kasih atas do'a, dukungan dan semangatnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dikemudian hari.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018

Penulis,

Mariatini

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Regulasi.....	8
2. Teori Entitas.....	9
B. Kinerja Keuangan Daerah	10
1. Laporan Keuangan Daerah	12
C. Opini Audit	15
D. Kinerja Pembangunan.....	19
E. Pengembangan Hipotesis	27
F. Penelitian Terdahulu.....	29
III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Definisi dan Operasional Variabel.....	37
1. Variabel Independen.....	37
2. Variabel Dependen	38
3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
C. Metode dan Teknis Analisis Data	39

D. Pengujian Asumsi Klasik.....	40
1. Uji Normalitas	40
2. Pengujian Hipotesis	40
3. Uji Koefisien Determinasi	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisis Data Sampel.....	42
B. Analisis Statistik Deskriptif	43
C. Uji Hipotesis	45
1. Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	45
2. Koefisien Determinasi	47
3. Pengujian Hipotesis	47
V. KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Keterbatasan Penelitian.....	49
C. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	29
3.1 Nilai Opini Audit	38
4.1 Sampel Penelitian.....	42
4.2 Hasil Statistik Tentang Opini BPK	43
4.3 Hasil Statistik Tentang Opini BPK	44
4.4 Hasil Statistik Tentang Kinerja Pembangunan	45
4.5 <i>Correlations</i>	46
4.6 Interpretasi Nilai r	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Data Opini BPK Se-Provinsi Sumatera Bagian Selatan	L-1
2 Data Pertumbuhan Ekonomi Se-Provinsi Sumatera Bagian Selatan	L-2
3 Output Olah Data	L-3
4 Tabel Uji r	L-5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Salah satu fungsi pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 yaitu melaksanakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Tujuan desentralisasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel (Penjelasan PP No. 6 Tahun 2008).

Selanjutnya Pemerintah daerah akan menghasilkan suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan rakyat.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.

Menurut Suaedy (2011) pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi seharusnya mengejar WTP bukan semata-mata untuk tujuan jangka pendek, namun lebih sebagai upaya untuk membudayakan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*) (Mardiasmo, 2006:90).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat berupa temuan audit, opini audit maupun kesimpulan audit.

Penelitian mengenai hasil audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) menggunakan opini audit

dalam menjelaskan hasil audit BPK.

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai disusun dan siap untuk diterbitkan kepada publik, maka diperlukan pelaksanaan sebuah audit guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurut Bastian (2006), audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif (Bastian, 2006).

Penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Serta penelitian Virgasari (2009) dan Indrarti (2011) yang menggunakan opini audit untuk menjelaskan variabel hasil audit. Pendapat audit dapat menjadi suatu tekanan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna menghasilkan kinerja yang baik pula.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu : (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsi dari Bappenas maka evaluasi tahunan, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009–2014 mutlak diperlukan. Untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMN di daerah, Bappenas bekerjasama dengan 33 Perguruan Tinggi Negeri di setiap provinsi melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) (Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Bappenas, 2016:1)

Pelaksanaan EKPD berdasarkan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2009–2014. Prioritas Nasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- (2) Pendidikan,
- (3) Kesehatan,
- (4) Penanggulangan Kemiskinan,
- (5) Ketahanan Pangan,
- (6) Infrastruktur,
- (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- (8) Energi,
- (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
- (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik,
- (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya adalah sebagai berikut: (1) Kesejahteraan

Rakyat, (2) Politik, Hukum, dan Keamanan, (3) Perekonomian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menguji korelasi opini auditor dengan kinerja pemerintah daerah , sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan antara opini auditor dengan kinerja pemerintah ?
2. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi hubungan opini auditor dengan kinerja pemerintah

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Area penelitian yang dilakukan terbatas pada Provinsi yang ada di Pulau Sumatera Khususnya Sumatera Bagian Selatan seperti : Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung
2. Pengukuran kinerja dengan memakai data yang Dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan rentang waktu selama 5 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. untuk menguji dan menganalisis hubungan opini auditor dengan kinerja pemerintah.

2. Menguji dan menganalisis faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan opini auditor dengan kinerja pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan daerah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama.

c. Bagi Penulis

Penulis mendapat tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan khususnya mengenai keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Para *Stake holder/ Masyarakat*

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melihat kinerja dari Pemerintah Daerah sehingga bertambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah

2. Manfaat Praktis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi.

Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Para ahli teori menyatakan bahwa regulasi terjadi sebagai reaksi terhadap suatu krisis yang tidak dapat diidentifikasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Tuntutan permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007)

Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka pada pemerintah.

Tujuan dari regulasi Akuntansi dari Sektor Publik di era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/ daerah menuju tata kelola yang baik.(Faizah Dwi Fitriyani, 2017 : 9). Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan berbagai undang- undang di atas, antara lain PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan- aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk Pemerintah Pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah.

2. Teori Entitas

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hendriksen dan Van Breda (1992), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dalam perspektif ini ,akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan usaha bukan pemilik.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia , teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi tiap- tiap kementerian negara

/ lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka entitas pelaporan dan entitas akuntansi dinyatakan dalam persyaratan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebagai berikut : Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Menurut Halim (2007:25) keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

B. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator kinerja. Analisis kinerja keuangan dilakukan dalam rangka menilai kinerja di masa yang lalu dengan melakukan realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut (Sularso dan Restianto, 2011). Inti dari sebuah Pengukuran kinerja sangat sederhana , yaitu sebuah organisasi publik merumuskan target kinerja yang

ingin dicapai dengan berbagai pertimbangan dan juga mengindikasikan bagaimana kinerja ini dapat diukur dengan indikator- indikator kinerja (de Bruijn, 2002).

Menurut Greiling (2002) yang mengutip The Organization for Economic Cooperation and development (OECD), pengukuran kinerja merupakan alat yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas . Data tentang bagaimana pelayanan publik diselenggarakan secara efektif dan efisien dapat diukur dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik berdampak pada kinerja organisasi. Kinerja organisasi pemerintah yang baik berarti efektif dan efisiennya penyediaan barang publik serta pelayanan publik (Mimba dkk, 2007)

Lebih lanjut menurut de Bruijn (2002), kinerja organisasi pemerintah sulit untuk dapat diukur kinerjanya, Hal ini dikarenakan dampak dari suatu program atau kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor . Program atau kegiatan yang dapat diukur kinerjanya secara langsung berupa keluaran, contohnya berupa laporan jumlah pasien yang dapat ditangani oleh dokter, laporan tentang jumlah jalan atau jembatan yang telah diperbaiki, laporan tentang jumlah sarana penunjang fasilitas umum yang telah dibangun., jumlah tanah masyarakat atau milik pemerintah yang sudah memiliki sertifikat hak milik dan lain sebagainya. Itulah sebabnya banyak sistem pengukuran kinerja berfokus pada keluaran.

Rantenen dkk (2007) menyatakan bahwa penetapan target kinerja dalam organisasi pemerintah tidak sejelas dalam sektor privat. Pada beberapa kasus, target utama dari suatu kegiatan seringkali tidak jelas. Dampak dari hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan aspek- aspek penting mana yang akan diukur.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur Mulyadi (2004:79) mengungkapkan bahwa “Pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya.

Menurut Halim (2007:231), pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

1. Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Untuk rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akan diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP RI No. 71 Tahun 2010). Entitas pelaporan harus mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan non lancar dan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010). Dalam Laporan Arus Kas, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos

sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dan kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. Pos luar biasa, bila ada;
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan (PP RI No. 71 Tahun 2010). Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal; surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan ekuitas akhir (PP RI No. 71 Tahun 2010). Rincian lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas akan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pembaca dan pengguna laporan keuangan perlu memahami dan membandingkan antar laporan keuangan. Untuk itu, maka suatu entitas akan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi semua penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam komponen laporan keuangan yang telah disebutkan di atas. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

C. Opini Audit

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, yang dimaksud dengan opini adalah

pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Efektivitas Pengendalian Intern;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
4. Pengungkapan yang Lengkap (*Full Disclosure*).

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Sebagian Pemeriksa memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup

audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Kemudian didukung oleh salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Oleh karena itu pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut. Begitu pentingnya peran pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi pengungkapan dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak yang independen, untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2002:20-22), opini auditor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified*

3. *Opinion with Explanatory Language*). Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraph penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan.
4. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
5. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
6. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan.

D. Kinerja Pembangunan

Kementerian Bappenas selaku pengambil kebijakan, koordinator, thin thank dan administrasi bekerjasama dengan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Perguruan tinggi negeri di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dengan menggunakan prioritas nasional RPJMD 2009- 2014 dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja menggambarkan tentang suatu kinerja yang

akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja dalam RPJMN 2009-2014 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan nasional di daerah. Dalam kegiatan ini, indikator kinerja hanya dilihat dari pencapaian indikator kinerja *impact/outcome*.

Indikator Kinerja yang dievaluasi meliputi :

1. Persentase Provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Perolehan opini wajar tanpa Pengecualian merupakan bentuk positif dari dari pengelolaan dan administrasi keuangan, prestasi yang baik dalam pelaporan WTP menyiratkan bahwasanya daerah semakin akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. Rata- rata lama Sekolah .

Pengukuran rata- rata Lama sekolah mengukur jumlah Tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang telah dijalani. Semakin tinggi tingkat rata- rata lama sekolah, menunjukkan kualitas pendidikan dari penduduk yang berada di suatu provinsi semakin baik.

3. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas

Angka melek aksara atau biasa disebut angka melek huruf, menunjukkan proporsi penduduk dengan usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat

melek huruf menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan mereka sehari-hari.

4. Laju pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan merupakan faktor yang penting dalam indikator sosial ekonomi pada umumnya dan masalah kependudukan pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah maupun negara.

5. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan cerminan dari tingkat usia rata-rata yang dicapai suatu penduduk dalam periode tertentu. Angka harapan hidup yang semakin baik mencerminkan kesehatan penduduk yang meningkat dan kualitas kesehatan yang baik. Jika daya beli masyarakat meningkat maka alokasi di bidang kesehatan akan meningkat sehingga akan bertambah

baik untuk memenuhi kebutuhan gizi.

6. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

7. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan banyak kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab lain. Informasi mengenai AKI bermanfaat dalam pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi.

8. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi dalam pembangunan di setiap negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga

produktivitas dan pendapatan menjadi rendah. Selain itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang terkait dengan faktor-faktor sosial, seperti meningkatnya kejahatan di kota-kota besar, timbulnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

9. Indeks Gini

Indeks gini atau biasa disebut koefisien gini didasarkan atas kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu dengan distribusi yang seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna dari indeks gini sendiri adalah mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang berkisar antara 0 sampai 1.

10. Nilai Tukar Petani

Tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio antara indeks harga yang

diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

11. Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan (NTN) pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Oleh karena indikator tersebut juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya, NTN merupakan rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu.

12. Persentase Jalan Nasional Dalam Kondisi Baik

Jalan dengan kondisi baik dapat diartikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$) sehingga arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase jalan nasional dalam kondisi baik mencerminkan seberapa besar persentase panjang jalan nasional yang ada di Indonesia mempunyai kesesuaian dengan kriteria teknis tersebut, sehingga arus perjalanan dapat dilalui tanpa ada hambatan.

13. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Yang Layak.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

14. Rasio Elektrifikasi

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika (UU No. 30/2007 tentang Energi). Indikator yang akan dievaluasi yaitu rasio elektrifikasi, dimana rasio elektrifikasi dapat didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada.

15. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu

angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka rata-rata Lama Sekolah), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka terbuka terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru, dimana perkembangannya menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan.

17. Indeks Demokrasi Indonesia (Provinsi)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, yakni Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Berpolitik

(*Political Right*), dan Lembaga–lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). IDI sendiri merupakan *country–led assessment*, yang dikembangkan berdasarkan keadaan di Indonesia dan bukan menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan di luar, karenanya IDI dibangun atas fondasi kepemilikan nasional.

18. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan suatu kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator umum yang mengukur kinerja dari perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dihitung dengan membandingkan angka atau nilai dari produk domestik regional bruto (PDRB) tahun dimaksud dengan tahun sebelumnya pada suatu wilayah.

E. Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian perbandingan kinerja pemerintah Kabupaten/ kota yang memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dan Non Wajar tanpa pengecualian (Non WTP) oleh Anifa Yasmin (2016) mengemukakan Bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota yang mendapat opini opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan dengan yang mendapat opini Non Wajar tanpa pengecualian (Non WTP) .

Kinerja pemerintah Kabupaten/ kota yang memperoleh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) terbukti memperoleh kepercayaan masyarakat dengan cara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika dilihat dari kesejahteraan masyarakat dan kelayakan hidup masyarakat daerah tersebut . Sedangkan yang memperoleh opini Non Wajar tanpa pengecualian (Non WTP) belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian mengenai korelasi opini auditor dengan kinerja pemerintah , maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah “ Apakah ada korelasi / hubungan positif antara opini auditor dengan kinerja pemerintah ”.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengukuran kinerja keuangan baik itu disektor publik maupun sektor privat, yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ramasamy dkk	2005	<i>Firm Size, Ownership, and Performance InThe Malaysian Palm Oil Industry</i>	Variabel independennya adalah <i>Firm Size</i> dan <i>Ownership</i> . Variabel dependennya adalah <i>Financial Performance</i>	Variabel <i>firm size</i> (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif terhadap <i>financial performance</i> (kinerja keuangan). Perusahaan milik swasta mempunyai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan milik pemerintah.
2	Sesotyaningtyas	2012	Pengaruh <i>Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Variabel independennya adalah <i>leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah</i> . Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel <i>leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota

3	Mustikarini dan Fitriasari	2012	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, temuan audit. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
4	Kusumawardani	2012	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independennya adalah <i>size</i> , kemakmuran, ukuran legislatif, dan <i>leverage</i> . Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel <i>size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5	Marfiana dan Kurniasih	2013	Pengaruh Karakteristik Pemerintah	Variabel independennya adalah	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan

			Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>karakteristik pemerintah daerah (dengan subvariabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan ukuran legislatif) dan hasil pemeriksaan audit BPK (dengan subvariabel temuan audit BPK dan opini audit BPK). Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>daerah, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.</p>
6	Utomo	2015	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap	Variabel independennya adalah karakteristik pemerintah daerah (dengan subvariabel	Ukuran pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

			Kinerja Pemerintah Daerah	ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan <i>leverage</i>) dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.	Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.
7	Susilawati	2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah	Variabel ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

				daerah.	kabupaten/kota.
8	Masdiantini dan Erawati	2016	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan, dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan audit, dan opini audit. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.	Variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Variabel kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
9	Ara dkk	2016	Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba	Variabel independennya adalah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK. Variabel dependennya adalah skor	Variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja modal, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba.

				kinerja pemda kabupaten/kota.	
10	Suryaningsih dan Sisdyani	2016	Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independennya adalah kemakmuran, status daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah, dan opini audit BPK. Variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.	Variabel kemakmuran dan belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah. Variabel opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.
11	Noviyanti dan Kiswanto	2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, ukuran legislatif, dan temuan audit. Variabel dependennya	Variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

				adalah kinerja pemerintah daerah.	keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai adanya korelasi/ hubungan positif antara opini auditor dengan kinerja pemerintah . Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa data keuangan dan data kualitatif yang berupa kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diambil adalah data keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah daerah kabupaten/kota, data dari Bappenas tentang Evaluasi Kinerja dan data opini audit BPK. Data keuangan dan opini audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK –RI). Sedangkan data opini diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau yang diperoleh serta dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Sipomo, 1999:147).

B. Definisi dan Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel penelitian merupakan atribut atau sifat yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen berupa Opini Audit BPK.

Masdiantini dan Erawati (2016) menyebutkan opini dapat didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Angelina dan Irsutami (2012) menyebutkan opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini Auditor BPK, menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 pengertian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), berbagai tipe pendapat auditor yaitu, pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Dalam penelitian ini variabel opini audit BPK diproksikan dengan 5 jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK. Dalam penelitian ini variabel opini audit didefinisikan dengan memberikan nilai skala 5 pada masing-masing jenis opini.

Dengan uraian dapat dilihat pada Tabel 3.1

TABEL 3.1. NILAI OPINI AUDIT

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja pembangunan daerah adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan nasional di daerah. Dalam hal ini variabel yang diukur adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator umum yang mengukur kinerja dari perekonomian suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dihitung dengan membandingkan angka atau nilai dari produk domestik regional bruto (PDRB) tahun dimaksud dengan tahun sebelumnya pada suatu wilayah

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan untuk Tahun Anggaran 2012 sampai dengan

2016. Jumlah seluruh pemerintah provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan sebanyak 5 (lima) provinsi. Selanjutnya, data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, hal ini dilakukan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Penentuan kriteria sampel dilakukan agar sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Pemerintah Daerah dan Kota yang memiliki kriteria:

- a. LKPD tahun anggaran 2012-2016 yang telah diserahkan dan telah selesai diperiksa oleh BPK dan telah memperoleh Opini dari BPK.
- b. Telah dilakukan penilaian terhadap evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

C. Metode dan Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2008)

D. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai distribusi data apakah normal atau tidak.

Analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil *One Sample Kolmogorov*

Smirnov. Pada uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* apabila variabel

pengganggu/*residual* mempunyai *Asymp. Sig (2-tailed)* di atas atau sama dengan

tingkat sidnifikansi sebesar 0,05 (probabilitas = 0,05) diartikan bahwa model

memiliki distribusi normal dan sebaliknya apabila variabel pengganggu/*residual*

mempunyai *Asymp. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05

(probabilitas < 0,05) diartikan bahwa model memiliki distribusi tidak normal.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi product

moment. Analisis korelasi product moment dimaksudkan dalam rangka pengujian

hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada probabilitas kesalahan

penolakan hipotesis nihil. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Uji Korelasi *Product Moment*

Analisis korelasi product moment dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis

hubungan keterikatan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan rumus

korelasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Kriteria Pengujian :

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$.
2. Ho diterima dan Ha ditolak jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$.

3. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan rumus Koefisien Determinasi (KP), dengan rumus sebagai berikut :

$$KP = (r)^2 \times 100\%$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu Opini BPK berhubungan dengan kinerja pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Kinerja pembangunan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Opini BPK sebesar 21,81% dan selebihnya 78,19% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak diteliti.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Sampel dalam penelitian ini hanya sebatas pada 5 (lima) provinsi yang tergabung pada wilayah Sumatera Bagian Selatan.
2. Pengalaman peneliti yang masih sangat terbatas sehingga menghambat dalam pelaksanaan penyusunan penelitian ini.
3. Waktu penyusunan skripsi yang dirasakan sangat mendesak, sehingga kurang mengoptimalkan penulis dalam proses penelitian.

C. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Indikator pengukuran kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya pada skor pertumbuhan ekonomi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas indikator pengukuran dengan menambahkan indikator pengukuran kinerja lainnya, sehingga hasil penelitian akan lebih baik lagi dan dapat digeneralisir.
- b. Sementara itu hasil audit BPK terkait temuan dan opini audit terhadap LKPD dapat dijadikan alat untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam mengelola kinerja daerahnya. Dalam upaya memperbaiki kinerja daerah, akan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan tindak lanjut rekomendasi dari BPK atas hasil audit BPK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga, Jakarta
- De Bruijn, H. (2002) *Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risk of Performance Measurement*. Emerald Insight 15, 578-593
- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M. F., (2013) *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (studi pada Kabuaoten dan Kota di Jawa Timur)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mahmudi. (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.1:1-17.
- Mimba, N.P., Van Helden, G., dan Tillema, S. (2007). *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries : A Literature Review and Research Agenda*. Emerald Insight 3, 193-195
- Mulyadi. 2001a. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Rantenen, H., Kulmana, H., Lonqvista, A., dan Kujansivu, P., (2007)
Performance Measurement Systems in the Finnish Public Sector,
emerald insight 20, 418- 419
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
- . *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- . *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.*
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Suaedy, Soleh. 2011. *Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah
Disampaikan Pada DiklatPim Tk.IV Manajemen Keuangan Surabaya. 20
Desember.
- Sularso, H., dan Restianto, Y. M (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap
Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di
Jawa Tengah.